



News Title : Beratkan Investor, Bappebti akan Evaluasi Penerapan Pajak Kripto	
Media Name : rmol.id	Journalist : Reni Erina
Publish Date : 05 March 2024	Tonality : Positive
News Page : 1	News Value : 1,500,000
Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Berjangka Komoditi Bappebti)	Ads Value : 500,000
Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Pajak Kripto

Bisnis

Read English Version

Beratkan Investor, Bappebti akan Evaluasi Penerapan Pajak Kripto



LAPORAN: **RENI ERINA**
Selasa, 05 Maret 2024, 12.08 WIB



Ilustrasi/Net

REPUBLIKMERDEKA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) akan mengevaluasi penerapan pajak kripto.

BERITA TERKAIT:

- Perkuat Perlindungan Masyarakat, Bappebti Blokir 1855 Situs PBK Ilegal
- Bappebti Lakukan Penanganan Aduan Berjangka dan Sesuai Peraturan Bidang PBK
- Akses Investasi Semakin Mudah, Ini 6 Tips Investasi Bagi Para Pemula
- Cegah Potensi Kerugian, Bappebti Blokir 1327 Domain Situs Entitas Ilegal PBK

Langkah itu dilakukan agar para investor hanya menanggung setengah dari total pajak yang dikenakan saat ini, sehingga semakin banyak investor yang tertarik terhadap pasar kripto Indonesia.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya menegaskan, evaluasi itu perlu dilakukan untuk mempertimbangkan pengenaan pajak.

"Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja," kata Tirta dalam keterangannya yang dikutip Selasa (4/3).

Semua pemangku kepentingan, termasuk Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, asosiasi, serta para pelaku pasar, harus ikut mendorong dilakukannya evaluasi pengenaan pajak ini, kata Tirta, agar nominal pajak yang diterapkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Pajak yang diperoleh dari transaksi kripto telah mampu menambah pendapatan negara sekitar Rp259 miliar dan berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap pendapatan industri fintech.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asparkindo Asih Kermiangsih yang mengatakan banyaknya pajak yang dikenakan terhadap pelaku pasar kripto di Indonesia membuat mereka memilih untuk beralih bertransaksi di pasar luar negeri.

BACA JUGA:

- Perhatikan 2L, Sebelum Investasi pada Aset Kripto
- Banyak Manfaat, Bappebti Hati-hati Susun Rancangan Kebijakan Ekspor CPO

"Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk mencegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange crypto dalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan," katanya, seperti dikutip dari Antara.